

Sudahkah Kita Merdeka?

Oleh:

Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D
Guru Besar Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM;
Chief Economist PT Recapital Advisors

Tahun 2008 ini merupakan tahun yang penuh momentum bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tahun ini, kita tidak hanya memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63, sekaligus 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 10 tahun Reformasi. Di tengah gegap gempita merayakan hari kemerdekaan ke -63, pertanyaan yang mendasar untuk diajukan: Sudahkah Kita Merdeka? Merdeka dalam arti tidak hanya bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, namun “merdeka” dari kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ketimpangan? Apakah momentum 100 tahun kebangkitan nasional sudah menunjukkan tanda-tanda ekonomi Indonesia mulai bangkit?

Dalam konteks inilah, sangat menarik untuk mencermati strategi dan arah kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden SBY saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN dan Nota Keuangan Tahun 2009 di depan DPR tanggal 15 Agustus lalu. Pertama, strategi pembangunan yang digariskan adalah strategi “pertumbuhan disertai pemerataan” atau “*growth with equity*”. Kedua, di tengah ancaman krisis pangan global, untuk pertama kalinya sejak masa Orde Baru, produksi beras nasional lebih tinggi daripada konsumsi beras dan kembali Indonesia mencapai swasembada beras. Ketiga, tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”, yang diterjemahkan dalam tiga prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; (2) percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan (3) peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Keempat, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, APBN mencapai angka di atas Rp1.000 triliun, tepatnya pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 1.022,6 triliun. Ini berarti meningkat Rp 127,6 triliun (14,3%) dari APBN-P tahun 2008; bahkan volumenya jauh lebih tinggi dibanding APBN tahun 2005 yang hanya sekitar Rp 500 triliun.

Kinerja Ekonomi

Krisis ekonomi yang menghancurkan bangsa ini pada tahun 1997 lalu sudah 10 tahun berlalu. Akibat dari krisis tersebut, segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia terkena dampak yang sangat besar. Kondisi pada tahun 1997, kemiskinan di Indonesia menyentuh angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 40,3% atau meningkat sebesar 22,6% dari tahun 1996. Menurut catatan Presiden SBY, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 17,7% pada tahun 2006 menjadi 15,4% pada Maret 2008. Bila angka ini dapat dipercaya, rekor kemiskinan pada tahun ini adalah paling rendah, baik besaran maupun persentasenya, selama 10 tahun terakhir.

Bagaimana dengan tingkat pertumbuhan ekonomi? Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat krisis tercatat negatif 13,1%. Sejak itu, Indonesia mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah hanya sekitar rata-rata 4,5% per tahun. Bahkan pada Semester I Tahun 2008 perekonomian Indonesia mampu mencapai tingkat pertumbuhan mencapai 6,4%, rekor tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998.

Namun, dampak krisis ekonomi terhadap pengangguran baru terasa pada tahun-tahun berikutnya. Ini terlihat dari tingkat pengangguran akibat PHK besar-besaran dan banyaknya penutupan usaha yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1998, pengangguran di Indonesia meningkat menjadi sebesar 5,5% dari sebelumnya sebesar 4,7% pada tahun 2007. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya angka pengangguran terus meningkat sampai menyentuh angka 10,28% pada tahun 2006, turun menjadi 9,9% pada tahun 2007, dan menjadi 8,5% pada Februari 2008. Relatif tingginya angka pengangguran menunjukkan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah 6,4% pasca krisis belum mampu menyerap tambahan kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara substansial.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia belum bisa dikatakan termasuk *best performer*. Hal ini dilihat dari besarnya GDP per kapita Indonesia yang hanya menduduki peringkat 4 dari 8 negara ASEAN. GDP per kapita Indonesia sebesar US\$1.924,73 masih kalah jauh dibandingkan dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Bila GDP per kapita tersebut dikurskan dalam rupiah maka pendapatan rata-rata per orang rakyat Indonesia hanya sekitar Rp 17,760 juta setahun atau Rp 1,5 juta per bulan. Demikian juga bila dihitung dengan *purchasing power parity*, ternyata GDP per kapita Indonesia hanya US\$3.843, yang menempati peringkat 107 dari 177 negara di dunia.

Bagaimana kondisi ketimpangan distribusi pendapatan pasca krisis? Memang PDB per kapita Indonesia telah mencapai US\$1.924,73, namun ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat. Ada dua indikator yang menunjukkan belum berkualitaskannya pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dilihat dari dimensi bagaimana "kue nasional" dibagi. Ketimpangan yang meningkat diukur dengan: Pertama, ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lebar, sebagaimana tercermin dari rasio gini yang meningkat dari 0,29 pada tahun 2002 menjadi 0,35 pada tahun 2006. Kedua, kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk termiskin mengalami penurunan dari 20,92 tahun 2002 menjadi 19,2 pada tahun 2006. Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40% penduduk termiskin justru diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20% kelompok terkaya dari 44,7% menjadi 45,7% pada tahun yang sama. Singkatnya, ada indikasi kuat adanya *trickle up effect*, efek muncrat ke atas, dalam proses pembangunan di Indonesia (<http://www.mudrajad.com>). Teori dampak menetes ke bawah (*trickle down effect*) agaknya tidak berlaku untuk negeri kita. Dengan kata lain, buah dari strategi pertumbuhan dengan pemerataan masih jauh dari yang dicanangkan oleh Presiden SBY.

Rekor Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Manusia seharusnya merupakan hakekat dari tujuan pembangunan, bukan hanya "kue pembangunan" dan "pertumbuhan kue". Sulit dikatakan ada pembangunan bila kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih substansial.

Salah satu indikator yang populer untuk mengukur kinerja pembangunan manusia adalah HDI (Human Development Index) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI mencoba mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (pembangunan manusia yang tertinggi). HDI merupakan indeks gabungan dari tiga indikator: *longevity* sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi melek huruf dewasa (berbobot tiga per empat) dan gabungan dari rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto (berbobot sepertiga), dan

standar hidup layak (*decent standard of living*) sebagaimana diukur oleh PDB riil per kapita dan dinyatakan dalam PPP\$.

Menurut *Human Development Report 2007-2008*, HDI Indonesia sebesar 0,728, yang berada dalam peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei oleh UNDP. Bila dirinci, HDI tersebut merupakan gabungan dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks GDP berdasarkan PPP (Purchasing Power Parity). Indeks GDP Indonesia mencapai 0,609. Angka harapan hidup orang Indonesia mencapai 69,7 tahun, atau dinyatakan dalam indeks harapan hidup mencapai 0,745. Indeks pendidikan mencapai 0,83 karena angka melek huruf sebesar 90,4% dan rata-rata rasio masuk sekolah dari SD sampai SMU mencapai 68,2%. Dengan kata lain, belum seluruh rakyat Indonesia “merdeka dari kebodohan”.

Dengan rekor pembangunan manusia seperti itu Indonesia sudah tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga. Peringkat negara-negara ASEAN masing-masing adalah 105 untuk Vietnam, 90 Philipina, 78 Thailand, yang bersama Indonesia masuk dalam kategori *medium human development*, rekor pembangunan manusia kelas menengah. Negara Malaysia, Brunei, Singapura, sudah mencapai negara dengan pembangunan manusia kategori tinggi karena masing-masing mencapai peringkat ke-63, 30, dan 25.

Refleksi

Hanya saja, sekarang ini dibutuhkan tidak hanya *policy mix* makro, namun koordinasi kebijakan pada lingkungan metaekonomi. Lingkungan meta ini mencakup antisipasi terhadap *natural disruption*, sektoral, dan daerah. Mengintegrasikan kebijakan pertanian, industri, dan energi nasional, sehingga tercipta suatu sinergi dalam mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki, guna menjamin terwujudnya *food and energy security*. Koordinasi lintas sektor dan daerah amat dibutuhkan karena pola perencanaan dan pembangunan Indonesia bersifat sektoral dan melibatkan 485 kabupaten/kota serta 33 provinsi. Ibarat lagu, lagu yang dimainkan berbagai macam. Ada keroncong, rock, jazz, gamelan, dan dangdut, dengan pemain dan penonton yang berbeda karakter dan perilaku. Inilah pentingnya “sang pemimpin” menjadi dirigen suatu orkestra kebijakan makro, sektoral, dan daerah.

Menarik dicatat, sejarah kebangkitan dan momentum perubahan Indonesia, dari 1908, 1928, 1945, sampai 1998, semuanya diukir oleh anak bangsa yang bermental “Harus Bisa”! Sejarah membuktikan rakyat Indonesia bisa *survive*, meski krisis dan cobaan tidak berhenti. Cobaan dan krisis, dari krisis moneter, krisis BBM, krisis listrik, krisis energi dan pangan global, bencana alam (tsunami, gempa bumi, banjir, longsor), pasti akan dan selalu membayangi langkah Indonesia di masa depan.

Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 155, Allah berfirman, “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” Dengan demikian, betapapun berat krisisnya, Indonesia harus BISA merdeka dari kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ketimpangan. Inilah hakikat makna kemerdekaan di era reformasi. Jelas ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Masalahnya, kebangkitan ekonomi Indonesia sebagai bangsa yang besar dan segani membutuhkan “jalan baru, mobil baru, atau sopir baru”?

Dirgahayu Republik Indonesia ke-63! Merdeka!!

Sumber: Koran Sindo, Senin 18 Agustus 2008